

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

Buku:

Amiruddin dan Zaenal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Press.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Cetakan ke15. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto. (2001). *Suharsini Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers: Jakarta.

Ayres, Ian & John Braithwaite. (1992). *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford: Oxford University Press.

Azwardi, Sukanto. (2014). *Efektifitas alokasi dana desa (ADD) dan kemiskinan di provinsi sumatera selatan*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Baswir, Revisond. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.

Burhan, Bungin. (2001), *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Airlangga University Prees.

Denzin. (2009). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Efendi, A'an dan Freddy Poernomo. (2017). *Hukum Administrasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. cetakan ke-11. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.

- Huberman, Miles dan Saldana. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Laksamana, A. (2018). *Public Relations in the Age of Disruption: 17 Pengakuan Professional PR & Kunci Sukses*. Yogyakarta: Bfirs.
- Lexy, Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Remaja.
- Mahmudi (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manan, Bagir. (1993). *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*. Karawang: UNISKA.
- Manan, Bagir. (2004) *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir. (2008). *Peraturan Kebijakan*. Varia Peradilan : Jakarta.
- Manullang. (2008), *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marbun, SF. (2018). *Hukum Administrasi Negara I*. Cetakan Kedua (Revisi). Yogyakarta: FH UII Press.
- Mulyana, Dedi. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. cetakan pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- Setiawan. (2004). *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simbolon, Maringan Masry. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simbolon, Tumpal. (2012). *Pengawasan dalam Organisasi Pemerintah*. Jakarta: Grasindo.

- Siyoyo, Sandu dan Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif R&D*. Cetakan Ke-20. Bandung: Alfabeta.
- Sukanto. (2015). *Pengawasan Efektif dalam Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syafie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafie, Inu Kencana. (2011). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Tanzeh, Ahnah. (2004). *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta, PT Bina Ilmu.
- Terry, G.R. (1981). *Principles of Management*. Illinois: Richard D. Irwin.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme.
- Wibowo. (2013). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijaya, Ryan Filbert. (2016). *Menjadi Kaya dan Terencana Dengan Reksa Dana*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Jurnal:

- Disantara, Fradhana Putra. (2020). “Legitimasi Surat Edaran dalam Penanganan Pandemi Covid-19”. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: Jurnal Rechtsidee Vol 6 No 2.
- Fachri, Muhammad, dkk. (2023). “Fenomena Hidup Mewah (Hedonisme dan Flexing) Para ASN”. Jurnal Andragogi Vol. 11 No. 1.
- Hanafiah, Ranti and Karjuni Dt Ma’ani. (2020). “Pelaksanaan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kantor Bkpsdm Kabupaten Tanah Datar”. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol. 2 (3), Hal. 125-133.
- Handayani, Erina Resti, dkk. (2023). “Penerapan Pola Hidup Sederhana dan Kedisiplinan Pejabat Pemegang Keuangan di Satuan Akademi Militer terhadap Perilaku Anti Korupsi”. Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan Vol. 4 (3).

Immanuel, Victor. (2013). “Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2009”. Jurnal Yudisial Vol 6 (1),Hal.33-47.

Inggiz, Rio Trifo dkk. (2019). “Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan”. Jurnal Dialektika Hukum Vol. 1 No. 1.

Komara, E. (2019). “Kompetensi profesional pegawai ASN (aparatur sipil negara) di Indonesia”. Jurnal Mimbar Pendidikan Vol. 4 (1),Hal. 73-84.

Skripsi:

Achdiat, F. M. (2019). *Penegakan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri di Kabupaten Cianjur Dihubungkan dengan Prinsip Good Governance*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.

Anggara, Doni. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mengawasi Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Skripsi.Riau:UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hurint, Farlian Belawa. (2017). *Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Skripsi. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya.

S., Dwi Agung Prastowo. (2024). *Kegiatan Flexing Dikalangan Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Kantor Walikota Makassar)*. Skripsi.SulawesiSelatan: UIN Alauddin Makassar.

Undang-undang:

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 758).

Peraturan Bupati Jombang No. 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang, (Berita Daerah Kabupaten Jombang Nomor 95).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 536).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 215).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 126).

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembar Negara Nomor 6718).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 142 , Tambahan Lembar Negara Nomor 4450).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, (Lembar Negara Tahun 2024 Nomor 15).

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana

Surat Edaran No. B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018, Tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam No: KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar Dan Mushala.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembar Negara Nomor 5234).

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembar Negara Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 141 , Tambahan Lembar Negara Nomor 6897).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembar Negara Nomor 5601).

UUD RI Tahun 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Website:

Anam, Saiful & Partners. (2013). Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Sistem Hukum Indonesia, lihat di <https://www.saplaw.top/kedudukan-surat-edaran-menteri-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, (diakses pada tanggal 25 Mei 2025 pukul 23.57).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang, lihat di <https://bkpsdm.jombangkab.go.id/profil/tupoksi>, (diakses pada tanggal 22 Februari 2025 pukul 11.05).

Badan Pusat Statistik kabupaten Jombang, lihat di <https://jombangkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/05/718/profil-kemiskinan-di-kabupaten-jombang-maret-2024.html>, (diakses tanggal 25 Oktober 2024 pukul 20.10).

Badan Pusat Statistik, lihat di <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>, (diakses tanggal 25 Oktober 2024 pukul 19.50).

CNN Indonesia. *Daftar PNS yang Dicapot Buntut Pamer Harta dan Gaya Hidup Mewah*. lihat di https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230320132950-532-927282/daftar-pns-yang-dicapot-buntut-pamer-harta-dan-gaya-hidup-mewah#goog_rewarded, (diakses tanggal 20 Oktober 2024 pukul 22.09).

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, *Pedoman Transliterasi Penulisan Skripsi*, <https://fasih.uinsatu.ac.id/download/category/2-dokumen-skripsi>, (diakses tanggal 18 April 2025 pukul 21.43).

Inspektorat Jombang. lihat di <https://inspektorat.jombangkab.go.id/profil/tupoksi>, (diakses pada tanggal 22 Februari 2025 pukul 13.15).

Kabupaten Jombang, lihat di <https://www.jombangkab.go.id/berita/umum/sertijab-dan-penyampaian-visi-misi-bupati-wakil-bupati-jombang-2025-2030-warsubi-salman-resmi-menjabat-11849>, (diakses pada tanggal 22 Februari 2025 pukul 09.20).

Kumorotomo, Wahyudi dan Zainal Abidin. (2023) *ASN: Boleh Kaya, 'Flexing' Jangan*. <https://www.voaindonesia.com/a/asn-boleh-kaya-flexing-jangan-7014336.htm>, (diakses tanggal 26 Oktober 2024 pukul 08.12).

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Anas Fauzi, S.Ag., selaku Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jombang, pada 7 Juli 2025 pukul 16.45.

Wawancara dengan Bapak Rafi, S.T., selaku Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jombang, pada 7 Juli 2025 pukul 14.10.

Wawancara dengan Bapak Taufik selaku Personal Auditor Muda di Inspektorat Kabupaten Jombang, pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 09.09.

Wawancara dengan Bapak Wahyu selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama di BKPSDM Kabupaten Jombang, pada tanggal 26 Mei 2025 pukul 10.53.

Wawancara dengan Ibu Norma selaku Kasubag Umum dan Kepagawaian di BKPSDM Kabupaten Jombang, pada tanggal 26 Mei 2025 pukul 10.39. .

Wawancara dengan Ibu Nurul Laili, S.Ag., selaku Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jombang, pada 7 Juli 2025 pukul 16.30.